

Jum'at, 21 Juli 2023

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Gaet Dukungan Pemilih, Perindo NTB Sebar KTA Berasuransi
Nama Media	Suara NTB
Newstrend	Perindo NTB Sebar KTA Berasuransi
Halaman/URL	Pg7
Tanggal Berita	2023-07-20
Sentimen	positive

Gaet Dukungan Pemilih, Perindo NTB Sebar KTA Berasuransi

Mataram (Suara NTB) –

Dalam rangka menarik simpati masyarakat untuk bergabung menjadi anggota, partai Perindo menawarkan program keanggotaan berasuransi. Dimana setiap orang yang terdaftar dan memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo akan mendapatkan asuransi jiwa.

"KTA berasuransi ini sebagai bentuk *reward* dari partai kepada masyarakat yang bergabung menjadi anggota Partai Perindo," jelas Sekretaris DPW Partai Perindo NTB, M. Nashib Ikroman yang dikonfirmasi usai membagikan KTA kepada anggota dan pengurus, pada Rabu (19/7).

Dipaparkan politisi muda Perindo yang akrab disapa Achip ini, bahwa KTA berasuransi itu mencakup asuransi kecelakaan dan asuransi meninggal dunia. "Misalnya anggota mengalami kecelakaan ketika beraktivitas diberikan bantuan pengobatan sebesar Rp300 ribu, dan kalau meninggal diberikan santunan sebesar Rp3 juta," ujar Achip.

Disebutkan Achip pada tahap pertama ini, pihaknya membagikan 50 ribu KTA berasuransi itu. Ke depannya ditargetkan sebanyak-banyaknya warga NTB yang bergabung menjadi anggota Perindo dan memegang KTA berasuransi itu.

"Ini baru start 50 ribu dulu, partai maunya anggota sebanyak-banyaknya bila perlu sampai ratusan ribu sampai satu juta anggotalah di NTB ini. Harapan kita minimal orang pegang kartu ini, bisa jadi indikator potensi suara partai," katanya.

Untuk distribusi KTA berasuransi partai Perindo itu akan dilakukan oleh Caleg di masing-

masing tingkatan. Sehingga dari jumlah sebaran KTA itu masing-masing caleg dan juga partai sudah bisa mengkalulasikan potensi perolehan suara pada Pemilu 2024 nanti. "Kita sosialisasikan sekaligus pembagian KTA Perindo berasuransi yang akan bagikan caleg kepada seluruh anggota Perindo dan yang akan mau bergabung," ujar Achip.

Dikatakan Achip bahwa dari sisi tahapan pemilu sudah mendekati tahapan masa kampanye karena tahapan administratif seperti perbaikan berkas persyaratan Caleg sudah dituntaskan. Sehingga partai mulai mengambilancang-ancang untuk meningkatkan kerja mesin politik dalam rangka menggaet dukungan.

"Tadi juta kita konsolidasi terkait kesiapan pemilu, kita mulai langsung gas untuk tahapan kampanye. Kita minta caleg di semua tingkatan bisa saling menopang sehingga suaranya paralel di semua tingkatan. Caleg DPR RI harus gandeng caleg Provinsi dan caleg kabupaten/kota," sebutnya.

Ketika disinggung terkait belum masifnya para Caleg Perindo bergerak di bawah, Achip memastikan bahwa semua caleg sudah mulai bergerak, namun demikian tidak semua gerakan para caleg tersebut bisa diekspose karena menyangkut strategi.

"Pokoknya yang penting dapat suara, bagaimana caranya mungkin caleg Perindo melakukan pendekatan personal *door to door*. Yang jelas kita punya instrumen dan indikator untuk mengukur kinerja, yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan karena itu strategis," pungkasnya. (ndi)



KTA - Muhammad Nashib Ikroman menunjukkan KTA berasuransi Partai Perindo.

Judul	HUT ke-9 Perusahaan Asuransi Jiwa Bank Central Asia Mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan keuangan keluarga
Nama Media	Guo Ji Ri Bao
Newstrend	HUT ke-9 Perusahaan Asuransi Jiwa Bank Central Asia
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-07-20
Sentimen	positive

中亚银行人寿保险公司九周年纪念 呼吁社区多多关照家庭健康与财务

【本报讯】中亚上市银行(BCA)旗下子公司中亚银行人寿(BCA Life)正在稳步迈入更成熟的第九年,在这九年里,中亚银行人寿取得了各种积极的成就,不断开发数字创新,因此能够持续提供最佳的产品,并且根据实际情况进行各种倡导。

中亚银行人寿相信,人寿保险行业将继续处于相当好的增长。

根据印尼人寿保险协会公布的数据,截至2023年第一季度末,人寿保险行业已保护了2,974万名个人投保人/被保险人和5,780万名团体投保人/被保险人。与2022年第一季度的成绩相比,总体新增参保人数超过1,200万人,

增长率达到16.6%。

中亚银行人寿公司总裁兼首席执行官克里斯汀(Christine Setyabudhi)表示,根据印尼人寿保险协会公布的数据,再加上当下人口红利,寿险行业的前景一片广阔。

克里斯汀说:“这良好的时机对中亚银行人寿来说是个良机,可进一步对客户id提供最佳的服务,并通过各种分销渠道,提供能满足不同客户群需求的人寿保险产品和服务,不断进行创新,让它们能够始终为更多的印尼人民提供保护。”

她补充说,2023年上半年的业绩表现,中亚银行人寿持续取得积极的财务业绩,成功录得保费收

入8,900.5亿盾,增长率为17.85%。中亚银行人寿资产质量也持续改善,达到2.73万亿盾,大幅增长20.67%。

不仅如此,中亚银行人寿拥有强大的储备头寸,数额达到1.89万亿盾,增长率为1.03%。

截至2023年6月,中亚银行人寿已为575,005名客户提供保险。公司税前利润达493.5亿盾,较去年同期大幅增长273.97%。

为了庆祝中亚银行人寿成立九周年,在2022年和2021年两年后,中亚银行人寿呼吁民众以步行/跑步来保持自己的健康和庆祝中亚银行人寿成立九周年和它带来的新挑战,也就是“现在让我们一起

参加2023年终极竞赛吧”(Now, Let's Go Ultima Race 2023)以虚拟步行活动锻炼力气,以此提高力气和耐力。

中亚银行人寿于2023年7月16日至31日举行活动,通过此次活动中亚银行人寿旨在推动印尼人民继续过着健康的生活,步行或跑步9公里路程,并在中亚银行人寿最新应用程序NOW by BCA Life完成锻炼的挑战。

“中亚银行人寿不断致力于推动人们通过运动锻炼采取更健康的生活方式。照顾家庭的健康,对我们来说是非常重要的,通过这次活动,举办让人振奋的活动,证明中亚银行人寿对客户的信任表示



参与者在结束步行之后合影留念

关注和赞赏。克里斯汀总结说:“活动的奖金达到数亿盾。通过锻炼和获得iPhone 14,身体变得健康。”

在完成为期19天的9公里步行或跑步,并成功完成在中亚银行人寿NOW by BCA Life应用程序的体育挑战后,完成者有机会赢得总价值达到数亿盾的奖品,包括智能手机、平板电脑、智能手表、电子

货币等等,并向前190名选手颁发金牌。

此前在2022年,题为Ajak Temanmu Ultima Race 2022的中亚银行人寿虚拟步行活动,引起民众兴致勃勃地参加,从参与人数超过7,500人,足可证明这一点。

中亚银行人寿承诺继续在社会和环境方面做出积极的贡献,为社区创造更好的生活素质。

Judul	AXA Mandiri Serahkan Manfaat Perlindungan Jiwa Sebesar Rp2 Miliar Lebih ke Nasabah Purwakarta
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	AXA Mandiri Memberikan Manfaat Perlindungan Jiwa
Halaman/URL	Pg8
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	positive

AXA Mandiri Serahkan Manfaat Perlindungan Jiwa Sebesar Rp2 Miliar Lebih ke Nasabah Purwakarta

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) membuktikan komitmennya sebagai perlindungan jiwa dan keuangan nasabah dengan menyerahkan secara simbolis manfaat Asuransi Mandiri Elite Plan sebesar Rp2 miliar lebih ke Taufan Satria Bijaksana dan Transiska Liesmadona ahli waris dari nasabah Taufik Bijaksana.

Taufik Bijaksana merupakan nasabah Asuransi Mandiri Elite Plan AXA Mandiri sejak tahun 2018. Polis ini memberikan perlindungan berupa manfaat perlindungan jiwa hingga bertanggung berusia 100 tahun, manfaat nilai tunai investasi, loyalty bonus hingga 50% dari premi dasar berkala hingga asuransi kesehatan tambahan.



Penyerahan klaim diserahkan secara simbolis oleh Regional Sales Head VI AXA Mandiri Wahyu Sri Wardani (*kiri*) ke Taufan (*tengah*) dan Transiska (*kanan*) di Purwakarta.

Bukti komitmen AXA Mandiri untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keuangan juga tercermin dalam klaim dan manfaat yang dibayarkan pada tahun 2022. Sepanjang tahun 2022 AXA Mandiri telah mem-

bayarkan klaim dan manfaat senilai hampir Rp12 triliun. Jumlah ini meningkat 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp9,05 triliun.

Sedangkan dari sisi produk terbaru, komitmen AXA Mandiri untuk menjadi mitra perlindungan kesehatan nasabah terwujud lewat Asuransi Mandiri Secure CritiCare, perlindungan penyakit kritis berlimpah jaminan. Asuransi Mandiri Secure CritiCare memberikan manfaat perlindungan kepada nasabanya dari kanker, serangan jantung, stroke dan gagal ginjal dari mulai stadium awal hingga akhir karena masa depan seharusnya tidak berisiko (*the future shouldn't be a risk*). (*)

Judul	IFG Life Fokus di Produk Proteksi
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	IFG Life mengembangkan saluran distribusi bisnis baru
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	positive

| BISNIS ASURANSI JIWA |

IFG Life Fokus di Produk Proteksi

Bisnis, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) akan mengembangkan saluran distribusi bisnis baru yang fokus menjual produk berbasis proteksi guna membalik penurunan kinerja premi pada paruh pertama tahun ini.

Fokus pada produk berbasis proteksi itu dilakukan, baik pada produk asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan.

IFG Life membukukan pendapatan premi Rp243,23 miliar sepanjang semester I/2023, 11% lebih rendah dari pencapaian periode sama tahun lalu.

IFG Life juga akan melanjutkan dan meningkatkan bisnis portofolio hasil pengalihan dari PT Asuransi Jiwasraya.

“Kami terus berupaya mengakselerasi kinerja untuk meraih pertumbuhan bisnis yang *sustain* dengan berbagai program dan terobosan

inovasi, salah satunya memperkuat penetrasi produk dan layanan digital kami,” kata Corporate Secretary IFG Life Gatot Haryadi kepada *Bisnis*, Kamis (20/7).

Chief Marketing Officer Dowi Benedict Teng menyebutkan, salah satu hasil transformasi digital perseroan adalah menghadirkan platform Life by IFG. Lewat platform *mobile* itu, nasabah dapat membeli produk asuransi dan mengajukan klaim.

Menurutnya, transformasi dan digitalisasi yang dilakukan perseroan tidak sebatas dalam hal pemasaran produk, tetapi lebih luas, yakni membawanya masuk ke dalam keseharian nasabah.

Dengan digitalisasi, seluruh proses berasuransi yang dilakukan nasabah, mulai dari pencarian produk, pembelian polis, pencarian lokasi layan-

an kesehatan, hingga klaim menjadi mudah.

“Setelah nasabah merasakan *experience* yang nyaman dan memudahkan mereka, tidak sulit bagi mereka untuk kembali lagi membeli produk asuransi dari IFG Life. Ini membuat pertumbuhan bisnis menjadi lebih berkelanjutan,” kata Dowi.

IFG Life menargetkan pendapatan premi tahun ini Rp1,7 triliun setelah membukukan Rp1,2 triliun tahun lalu. Perusahaan juga membidik laba Rp155,5 miliar atau 7,2% di atas realisasi laba Rp145,1 miliar (*unaudited*) pada 2022.

Direktur Utama IFG Life Harjanto Tanuwidjaja sebelumnya mengatakan, target pertumbuhan laba dipasang satu digit karena perusahaan masih berkonsentrasi pada migrasi polis Jiwasraya.

(Pernita H. Untari)

Judul	ATURAN MAIN SPIN OFF UNIT SYARIAH KIAN PASTI
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS)
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	positive

| KONSOLIDASI ASURANSI |

ATURAN MAIN SPIN OFF UNIT SYARIAH KIAN PASTI

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan akhirnya meluncurkan aturan turunan pemisahan alias *spin off* unit usaha syariah (UUS) perusahaan asuransi dan reasuransi, tepat 6 bulan setelah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) terbit. Aturan itu a.l. menetapkan syarat ekuitas UUS yang bisa melakukan *spin off*.

Pernita H. Untari
redaksi@bisnis.com

Regulasi teknis itu termuat dalam Peraturan OJK No. 11/2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang berlaku mulai 11 Juli.

OJK mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi kriteria tertentu untuk melakukan pemisahan unit syariahnya.

Kriteria itu, pertama, nilai dana *tabarru'* dan dana investasi peserta unit syariah telah mencapai minimal 50% dari total nilai dana asuransi, dana *tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Kedua, ekuitas minimum telah mencapai minimal Rp100 miliar bagi UUS perusahaan asuransi dan Rp200 miliar bagi UUS perusahaan reasuransi, berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik.

Dalam hal selama proses *spin off*,

aset atau ekuitas UUS menurun dan tidak lagi mencapai persyaratan, kondisi itu tidak menghilangkan kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk melakukan *spin off*.

UUS yang belum memenuhi persyaratan ekuitas minimum dapat memilih beberapa opsi, meliputi penambahan ekuitas yang berasal dari pemegang saham perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, penambahan ekuitas yang berasal dari investor baru, atau pengalihan seluruh portofolio kepemilikan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Perusahaan asuransi diberi waktu untuk memisahkan UUS-nya menjadi perusahaan sendiri paling lambat 31 Desember 2026. Jika tenggat itu dilanggar, maka OJK akan mencabut izin pembentukan UUS perusahaan bersangkutan.

Pemisahan unit syariah dilakukan dengan tujuan memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan sumber daya manusia, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.

"Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan resiliensi perusahaan perasuransian dalam kondisi krisis, sekaligus mendukung transformasi proses bisnis dengan mengoptimalkan inovasi teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan jangkauan perusahaan perasuransian dalam menyediakan produk/layanan," demikian bunyi penjelasan POJK 11.

Kewajiban pemisahan UUS asuransi dan reasuransi ditetapkan di

tengah tren penurunan ekuitas asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia. Ekuitas asuransi syariah di Tanah Air per Maret 2023 tercatat Rp29,4 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang senilai Rp32,7 triliun. Ekuitas reasuransi syariah bahkan minus Rp85 miliar dibandingkan dengan Rp370 miliar setahun lalu.

RESPONS PEMAIN

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) menyatakan siap melakukan *spin off* UUS-nya menyusul penerbitan POJK 11.

"Kami telah memiliki rencana dan persiapan yang matang yang tidak bertentangan dengan POJK," ujar Presiden Direktur Tugu Insurance Tatang Nurhidayat kepada Bisnis.

Menurutnya, proses *spin off* kemungkinan akan selesai tahun depan.

Asuransi Tugu dan entitas anak memiliki aset Rp22,61 triliun pada kuartal I/2023, tumbuh 4,77% dari setahun lalu. Ekuitas perseroan tercatat Rp9,34 triliun.

Asuransi Tugu pun mengantongi laba tahun berjalan Rp924,14 miliar pada Januari–Maret 2023, terbangun 1.184,48% *year-on-year* (YoY). Perolehan laba itu ditopang premi bruto yang tumbuh 28,59% YoY menjadi Rp1,61 triliun.

Sementara itu, PT AXA Financial Indonesia belum dapat memberikan tanggapan. Sebelumnya, Presiden Direktur AXA Fi-

nancial Indonesia Niharika Yadav mengatakan, perusahaan memilih menunggu OJK meanggunkan regulasi terlebih dahulu sebelum memulai proses *spin off* (Bisnis, 18/5).

Sementara menunggu regulasi rampung, perseroan akan mempersiapkan diri untuk memisahkan UUS dari perusahaan induk, termasuk menumbuhkan bisnis usaha syariah. Selain itu, perusahaan akan meluncurkan produk syariah yang mumpuni, serta memastikan semua yang dibutuhkan untuk *spin off* berjalan dengan baik.

"Intinya kami berkomitmen untuk itu [*spin off*], tetapi kami menunggu kejelasan dari OJK," kata Yadav.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bulan lalu juga menyatakan belum berencana untuk memisahkan UUS menjadi entitas baru dalam waktu dekat.

"Kalau pisah itu, sama seperti Anda kapan keluar dari rumah? Kalau sudah dewasa kan? Kalau kami belum sejauh itu," kata Edy di sela-sela acara *Kolaborasi Kebajikan Aksi Berbagi x Pospay di Jakarta*, Kamis (22/6).

Adapun, rencana pemisahan UUS PT Asuransi Allianz Life Indonesia ditargetkan rampung pada kuartal III/2023.

Managing Director Allianz Life Syariah Achmad K. Permana mengatakan, Allianz Syariah akan mulai beroperasi paling lambat September 2023. Menurutnya,

pengajuan *spin off* tinggal menunggu izin dari regulator.

Dia menuturkan, susunan kepengurusan seperti komisaris dan direksi Allianz Syariah telah ditetapkan.

"BOD [ajaran komisaris] sudah lengkap. Tinggal [persetujuan] dari OJK," katanya.

Dia menambahkan, Allianz Syariah akan membidik segmen kelas menengah, salah satunya dengan produk proteksi kesehatan.

Sementara itu, sembari memberi waktu kepada perusahaan asuransi dan reasuransi untuk memproses *spin off* UUS, OJK tidak memberikan izin pembentukan unit syariah baru bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, sebagaimana tercantum dalam ketentuan lain-lain POJK. Meskipun demikian, berdasarkan pertimbangan tertentu, regulator dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda.

Adapun, bagi perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah mengajukan permohonan *spin off* sebelum POJK 11/2023 diundangkan, tetapi belum memenuhi syarat nilai minimal dana *tabarru'* dan dana investasi, serta ekuitas, dapat mengajukan permohonan pembatalan pemisahan UUS.

POJK 11/2023 merupakan aturan teknis UU PPSK yang mengamalkan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk memisahkan UUS menjadi perusahaan sendiri. □

“

Hal ini [POJK No. 11/2023] dimaksudkan untuk meningkatkan resiliensi perusahaan perasuransian dalam kondisi krisis.

Jumlah Industri Asuransi Syariah Per Maret 2023 (Unit)
Asuransi jiwa syariah: 8
Asuransi umum syariah: 6
Reasuransi syariah: 1
Total: 15

Aset Asuransi Syariah Per Maret 2023 (Rp Miliar)
Asuransi jiwa syariah: 34.929
Asuransi umum syariah: 9.078
Reasuransi syariah: 2.542
Total: 45.341

Ekuitas Asuransi Syariah Per Maret 2023 (Rp Miliar)
Asuransi jiwa syariah: 25.494
Asuransi umum syariah: 4.008
Reasuransi syariah: -85
Total: 29.418

Sumber: OJK

BisnisID Prensio

UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) mengamalkan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk memisahkan unit usaha syariahnya (UUS) menjadi perusahaan sendiri. Kewajiban itu berlangsung di tengah tren penurunan ekuitas asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia.

Aset Asuransi Syariah (Rp Triliun)

Mar. 2022	01 Apr.	Mei 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Agst. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Des. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mar. 2023
45,17	45,54	44,23	45,72	46,06	45,82	44,99	45,19	45,2	45,03	45,28	45,56	45,34

Ekuitas Asuransi Syariah (Rp Triliun)

Mar. 2022	Apr. 2022	Mei 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Agst. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Des. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mar. 2023
32,68	33,03	31,86	32,36	32,55	32,41	31,13	31,18	30,76	30,68	30,82	30,26	29,42

Aset Reasuransi Syariah (Rp Triliun)

Mar. 2022	Apr. 2022	Mei 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Agst. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Des. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mar. 2023
2,02	2,05	2,09	2,15	2,2	2,25	2,24	2,3	2,35	2,41	2,34	2,38	2,46

Ekuitas Reasuransi Syariah (Rp Miliar)

Mar. 2022	Apr. 2022	Mei 2022	Jun. 2022	Jul. 2022	Agst. 2022	Sep. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Des. 2022	Jan. 2023	Feb. 2023	Mar. 2023
370	336	349	359	369	157	181	139	104	50	-28	-48	-85



Judul	Konsolidasi Sektor Perasuransian Dimulai
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS)
Halaman/URL	Pg1&7
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	positive

Konsolidasi Sektor Perasuransian Dimulai

Oleh Prisma Ardianto

JAKARTA, ID – Konsolidasi di sektor perasuransian resmi dimulai. Ini ditandai dengan terbitnya aturan tentang pemisahan atau *spin-off* unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Aturan ini dalam waktu dekat akan disusul dengan sejumlah regulasi terkait lainnya.

Regulator di sektor jasa keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 (POJK 11/2023) tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Aturan ini ditetapkan dan diundangkan pada Selasa, 11 Juli 2023.

POJK 11/2023 bergulir atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). POJK 11/2023 sekaligus mengakomodasi adanya kelonggaran waktu untuk *spin-off* UUS perusahaan

asuransi/reasuransi syariah yang sebelumnya wajib digelar pada 2024.

"Masih sedikit perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang melakukan pemisahan unit syariah mengindikasikan sebagian besar perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi masih memerlukan waktu untuk melakukan evaluasi dan persiapan dalam melakukan pemisahan unit syariah," terang OJK dalam penjelasan POJK 11/2023.

Selain pertimbangan bisnis, lanjut POJK itu, kerangka pengaturan

juga menjadi salah satu pertimbangan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam melakukan pemisahan unit syariah.

OJK juga menyadari, proses *spin-off* yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi/reasuransi membutuhkan penyempurnaan aturan. Sebab, pengaturan sebelumnya diakui berpotensi multitafsir yang dapat menghambat pelaksanaan *spin-off*.

>> KE HAL 7

Konsolidasi Sektor Perasuransian Dimulai

> Sambungan dari hal 1

Belum lagi, *market share* syariah sejatinya sangat besar, kewajiban *spin-off* UUS yang diwajibkan dalam UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) dapat berpengaruh sangat signifikan terhadap struktur pasar. Termasuk pengaruhnya terhadap perkembangan asuransi/reasuransi syariah pascaseluruh perusahaan asuransi/reasuransi melakukan *spin-off*.

"Oleh karena itu, langkah persiapan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi perlu mendapat dukungan dari seluruh *stakeholders* agar implementasi UU P2SK mengenai kewajiban pemisahan unit syariah dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan industri asuransi syariah dan reasuransi syariah di Tanah Air," jelas OJK.

Lebih dari sekedar *spin-off*, aturan ini diselaraskan dengan pengaturan-pengaturan lainnya di sektor perasuransian. Aturan mengenai *spin-off* lebih dulu terbit mengingat UU P2SK mengamatkan demikian. Sementara aturan-aturan terkait lainnya masih diramu lebih matang oleh OJK.

Nantinya, aturan *spin-off* men-

jadi bagian penting dalam kerangka besar transformasi sektor perasuransian, yang di antaranya turut mengubah berbagai ketentuan lain. Sebut saja, perubahan aturan tentang peningkatan modal disetor saat pendirian perusahaan, meningkatkan ekuitas minimum, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, penguatan ekosistem industri, dan penerapan standar internasional.

Seluruh pengaturan tersebut memiliki satu tujuan yaitu konsolidasi di sektor perasuransian. "Pengaturan pemisahan unit syariah bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi juga diselaraskan dengan arah pengaturan yang bertujuan untuk mendorong konsolidasi pada industri perasuransian," jelas OJK.

Ada sejumlah substansi pengaturan tentang *spin-off* yang diterangkan dalam aturan tersebut. Yakni pengaturan mulai dari bentuk, kriteria, kewenangan OJK, permodalan, mekanisme dan tata cara, sanksi, penilaian kembali pihak utama, hingga insentif.

Adapun bentuk *spin-off* meliputi UUS yang telah memenuhi syarat tertentu, karena permintaan sendiri, dan atas kewenangan OJK dalam rangka konsolidasi. UUS yang sudah memenuhi kriteria tertentu tertentu wajib melang-

sungkan *spin-off*.

Kriteria yang dimaksud, pertama, nilai dana tabarru' dan dana investasi UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total dana asuransi dana tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Kedua, ekuitas minimum UUS asuransi Rp 100 miliar dan UUS reasuransi Rp 200 miliar. Ketiga, sekalipun dalam perjalanannya ekuitas menurun dan tidak mencapai persyaratan, perusahaan tidak terlepas dari kewajiban *spin-off*.

Tuntas Tahun Ini

Beberapa aturan yang belum terbit pun ditargetkan bisa digulirkan tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan, RPOJK tentang tata kelola dan manajemen risiko, hingga RPOJK terkait permodalan sudah menyelesaikan tahap diskusi.

"Regulasi masih diwacanakan, kita juga bicarakan dengan pihak asosiasi, ada AAJI, AAUI, ada AASI, kami panggil mereka. Ini (regulasi) sudah mengerucut, tahun ini POJK-nya sudah akan keluar," kata Ogi dalam sesi *podcast* di kutip Kamis (20/7/2023).

Segala bentuk pengaturan yang nantinya digulirkan bertujuan

untuk meningkatkan resiliensi perusahaan perasuransian dalam kondisi krisis. Di saat yang sama, penyempurnaan regulasi juga akan mendukung transformasi proses bisnis dengan mengoptimalkan inovasi teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan jangkauan perusahaan perasuransian dalam menyediakan produk/layanan.

Ogi juga sempat menyatakan, pengaturan tentang batas permodalan akan selaras dengan pengaturan *spin-off*. Salah satunya adalah terkait jangka waktu pemenuhan ekuitas minimum yang dibutuhkan untuk suatu perusahaan asuransi/reasuransi syariah berdiri.

Menurut dia, langkah konsolidasi di sektor perasuransian ini juga bagian dari upaya OJK mempercepat pertumbuhan, mengingat tingkat penetrasi asuransi yang masih sangat rendah. Padahal, potensi pertumbuhannya di Indonesia dengan sangatlah besar.

Substansi Pengaturan

Dalam POJK 11/2023, ada sejumlah substansi pengaturan tentang *spin-off* yang diterangkan dalam aturan tersebut, mulai dari bentuk, kriteria, kewenangan OJK, permodalan, mekanisme dan tata cara, sanksi, penilaian kembali

pihak utama, hingga insentif.

Beberapa hal yang mencolok adalah kewajiban para perusahaan asuransi/reasuransi yang memiliki unit syariah untuk menuntaskan proses *spin-off* pada 31 Desember 2026. Jika tidak, OJK berwenang untuk mencabut izin usaha unit syariah tersebut.

Para perusahaan asuransi/reasuransi pemilik unit syariah diwajibkan menyampaikan rencana kerja *spin-off* paling lambat pada 31 Desember 2023, artinya mereka punya waktu kurang dari enam bulan sejak aturan ini diterbitkan.

Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance/BRINS) Rahmat Budi Legowo menyampaikan, POJK 11/2023 dengan detail waktu implementasi yang ada menawarkan pola baru. OJK kini memahami bahwa industri perasuransian memang butuh waktu lebih untuk suatu entitas syariah yang berdiri sendiri dapat mandiri. Oleh karena itu, perencanaan harus benar-benar matang.

Dia mengatakan, BRINS sendiri telah menyiapkan diri untuk implementasi *spin-off* unit syariah yakni pada 2024. "Memang sebenarnya *market*-nya luas, tapi (*spin-off*) tidak gampang," kata Budi.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRINS Heri Supriyadi mengatakan, sesuai regulasi, entitas unit syariah dapat dipisahkan menjadi entitas sendiri atau menjual portofolionya. Nasib unit syariah perseroan sendiri belum ditentukan sampai saat ini oleh pemegang saham pengendali (PSP) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

PMO Unit Syariah BRI Insurance itu juga menyatakan, meski nasibnya belum ditentukan, unit syariah sudah siap apapun keputusan BRI nantinya. Segala persiapan sudah dilakukan, mulai dari kompetensi dan sertifikasi SDM, model bisnis, portofolio, hingga pemisahan neraca keuangan.

"Ini sudah jelas secara internal sudah disiapkan. Tinggal nantinya keputusan ada di BRI, mau dilepas atau portofolionya dijual ke tempat lain. Itu masih belum diputuskan," ungkap Heri.

Menilik lanskap asuransi syariah, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mencatat total aset sampai Januari 2023 mencapai Rp 45,28 triliun. Sementara premi atau kontribusi bruto mencapai Rp 2,55 triliun. Penetrasi asuransi syariah baru sebesar 0,13% dengan densitas sebesar Rp 94.577.

Judul	Nasabah Masukkan Nama ke Tim Likuidasi Kresna Life
Nama Media	Kontan
Newstrend	OJK Cabut Izin Kresna Life
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	positive

Konter

Nasabah Masukkan Nama ke Tim Likuidasi Kresna Life

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life pada 23 Juni 2023. Alhasil, batas akhir untuk membentuk tim likuidasi lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersisa beberapa hari lagi, tepatnya hingga 23 Juli 2023.

Kuasa Hukum beberapa nasabah Kresna Life Benny Wulur menyampaikan telah melakukan diskusi bersama pengurus Kresna Life Seto dan Zulkarnaen serta Michael Steven sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk menentukan sosok yang akan masuk dalam tim likuidasi pada Senin (17/7).

Dalam wawancara tersebut, Benny menerangkan satu dari dua nama usulan pemegang polis untuk tim likuidasi telah lulus seleksi. Dia mengklaim satu nama calon likuidator yang diajukan nasabah unggul secara keilmuan dan hasil wawancara sehingga berpotensi besar terpilih dalam RUPS. "Salah satu yang diajukan pemegang polis begitu menonjol kebetulan dari kalangan profesional dan calon doktor," terang Benny.

Ferry Saputra

Judul	Batas Akhir Spin Off Unit Asuransi Syariah di 2026
Nama Media	Kontan
Newstrend	Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS)
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	positive

■ ASURANSI SYARIAH

Batas Akhir Spin Off Unit Asuransi Syariah di 2026

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengatur pemisahan unit atau *spin off* perusahaan asuransi syariah.

Lewat Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, salah satu isi dari beleid ini adalah entitas asuransi dan reasuransi yang punya unit usaha syariah (UUS), harus memisahkannya paling lambat 31 Desember 2026.

Spin off mensyaratkan perusahaan memenuhi nilai dana tabarru dan dana investasi

peserta unit syariah telah mencapai paling sedikit 50%, dari total nilai dana asuransi, dana tabarru dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu, ekuitas minimum unit syariah telah mencapai paling sedikit Rp 100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi, dan Rp 200 miliar bagi unit usaha syariah perusahaan reasuransi.

Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit syariah wajib menyampaikan perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah kepada

regulator untuk mendapat persetujuan paling lambat 31 Desember 2023.

Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance Rahmat Budi Legowo menyatakan, sebenarnya perusahaannya telah berencana melaksanakan *spin off* di tahun 2024, sesuai dengan POJK yang berlaku sebelumnya.

"Waktu itu ada perubahan lagi waktunya 10 tahun, itu pun apabila portofolio asuransi syariah sudah melebihi 50% dari total portofolio yang dimiliki oleh satu entitas," te-

rang Rahmat, Kamis (20/7).

Rahmat menuturkan bahwa BRI Insurance bakal menamb-

bah portofolio unit syariahnya di tahun 2023 ini menjadi 7%. "Portofolio kami tahun lalu Rp 2,6 triliun, dan syariah mengambil porsi sekitar Rp 100 miliar, kurang lebih 4%. Tahun ini dari portofolio Rp 3,2 triliun, direncanakan porsi syariah menjadi 7%," tutur Rahmat.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life Indonesia) juga menyatakan persiapan *spin off* semakin matang. Bahkan perseroan menarget-

kan aksi itu akan terjadi pada awal semester II-2023.

"Persiapan sudah 90% lebih, jadi nanti setelah dapat lisensi OJK kemudian kita *fully operated* mungkin 1-2 bulan setelah itu," kata *Managing Director Sharia* Allianz Life Indonesia Achmad Kusna Permana. Ia menyebutkan, bahwa pada kuartal pertama tahun 2023, pihaknya memiliki ekuitas di angka Rp 5,7 triliun untuk bisnis konvensional, dan Rp 3,2 triliun untuk unit syariah.

Arif Ferdianto

Judul	Meneropong Dividen BUMN Kakap Milik Negara Tetangga
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Meneropong Dividen
Halaman/URL	Pg7
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	positive

Meneropong Dividen BUMN Kakap Milik Negara Tetangga

JAKARTA ID - Temasek Holdings dan Khazanah Nasional Berhad menjadi satu contoh *superholding* sukses dari negara tetangga. Perusahaan *holding* yang dikelola pemerintah Singapura dan Malaysia tersebut bahkan mampu menancapkan bisnisnya sampai ke negara lain. Singapura dengan Temasek Holdingnya saat ini sudah memiliki 13 kantor perwakilan yang tersebar di sembilan negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Singapura yang telah berdiri sejak 1974 ini, seperti dilansir dalam laman resminya memiliki portofolio sebesar SGD 382 miliar atau setara Rp4.325 triliun per

Maret 2023. Memproklamkan dirinya sebagai perusahaan investasi, Temasek membawahi sejumlah anak usaha yang sahamnya tersebar di berbagai sektor. Di sektor jasa keuangan, Temasek memiliki saham di AIA Group Limited, BlackRock, DBS Group Holdings Ltd, ICBC Ltd, PayPal Holdings Inc, Prudential, China Construction Bank Corp, Ping An Insurance Group Company Ltd, Standard Chartered PLC. Di sektor telekomunikasi, media dan teknologi, Temasek memiliki saham di Singtel, Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Hold-

ings Ltd, STTelemedia, Mediacorp Pte Ltd, Roblox Corporation, dan Meituan. Di sektor transportasi dan industri, kepemilikan saham Temasek ada di Keppel Corporation Ltd, Schneider Electric India Pvt Ltd, Singapore Airlines Ltd, SMRT Ltd, SATS Ltd. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan di bawah Temasek tahun lalu berhasil memberikan *dividend income* sebesar SGD 11 miliar atau setara dengan Rp124,54 triliun. *Chairman* Temasek Lim Boon Heng seperti dikutip dalam situs resmi Temasek, mengatakan di tengah ketidakpastian global pihaknya

memperlambat ekspansi. "Per 31 Maret 2023, nilai portofolio bersih kami mencapai SGD 382 miliar, turun sebesar SGD 21 miliar dari tahun sebelumnya. Sebagian besar disebabkan oleh penurunan valuasi ekuitas global, baik di pasar swasta maupun publik. Namun, portofolio Singapura kami tetap tangguh," tulisnya. Sementara negara tetangga lainnya, Malaysia, memiliki Khazanah Nasional Bhd yang dibentuk pemerintah sejak 1993. Perusahaan di bawah naungan kementerian keuangan Malaysia ini dibentuk dengan tujuan membangun aset keuangan dan mengelola sumber

pendapatan negara demi pembangunan ekonomi negaranya. Seperti halnya Temasek, perusahaan di bawah naungan Khazanah juga merambah ke beberapa negara. Seperti perusahaan yang bergerak di sektor jasa komunikasi yaitu Axiata Group Berhad, Astro Malaysia Holdings Berhad, Telekom Malaysia Berhad, dan TIME dotCom Berhad. Di sektor jasa keuangan, ada CIMB Group Holdings Berhad, Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan Sun Life Malaysia Assurance Berhad serta Sun Life Malaysia Takaful Berhad. Di sektor transportasi dan logistik antara lain ada; Malaysia Aviation Group Berhad,

Malaysia Airports Holdings Berhad, dan PLUS Malaysia Berhad. Secara kinerja tahun lalu mengutip laman resminya, Khazanah membukukan laba operasional sebesar RM 1,6 miliar setara Rp 5,27 triliun. Berfokus pada keuntungan jangka panjang, Khazanah menempatkan portofolio yang seimbang pada sektor saham publik, saham swasta dan aset riil. Sebesar RM 6,6 miliar ditempatkan pada investasi baru dan RM 2,5 miliar diperoleh dari monetisasi aset. Sementara itu sepanjang 2022, Khazanah mengumumkan dividen sebesar RM 500 juta atau setara Rp1,65 triliun kepada pemerintah Malaysia. **(ola)**

Judul	OJK Cabut Izin Pembentukan Unit Syariah
Nama Media	Tribun Kaltim
Newstrend	Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS)
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	negative

OJK Cabut Izin Pembentukan Unit Syariah

► Ekuitas Minimum Rp100 Miliar

JAKARTA, TRIBUN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis peraturan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan (spin off) Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Baleid ini salah satunya meminta perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit usaha syariah (UUS). Baleid ini untuk melakukan pemisahan (spin off) paling lambat 31 Desember 2026.

"Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan belum melakukan Pemisahan Unit Syariah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud, OJK berwenang melakukan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah," tulis Baleid tersebut dikutip dari [Konan.co.id](https://konan.co.id), Kamis (20/7).

Dijelaskan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan syariah yang baru.

Perusahaan bahkan belum memenuhi persyaratan ekuitas (modal) minimum wajib melakukan penambahan modal.

"Penambahan ekuitas Unit Syariah yang berasal dari pemegang saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, penambahan ekuitas Unit Syariah yang berasal dari

investor baru dan/atau pengalihan seluruh portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha," jelasnya.

Syarat yang perlu dipenuhi perusahaan untuk spin off ini di antaranya nilai dana tabarru' dan dana investasi peserta Unit Syariah telah mencapai paling sedikit 50%, dari total nilai dana asuransi, dana tabarru'. Serta dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu, ekuitas minimum unit syariah telah mencapai paling sedikit Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi.

Kemudian Rp200 miliar bagi unit usaha syariah perusahaan reasuransi.

Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit syariah wajib menyampaikan perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah kepada regulator untuk mendapat persetujuan paling lambat 31 Desember 2023.

Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance Rahmat Budi Legowo menyatakan bahwa sebenarnya persoalan telah berencana untuk melakukan spin off di tahun 2024. Ini sesuai dengan POJK yang berlaku sebelumnya.

"Waktu itu ada peruba-

han lagi waktunya 10 tahun, itu pun apabila portofolio asuransi syariah itu sendiri sudah melebihi 50% dari total portofolio yang dimiliki oleh satu entitas," ujarnya.

Budi menuturkan bahwa pihaknya siap mengikuti aturan spin off UUS yang dicanangkan oleh regulator. Bahkan pihaknya bakal menambah portofolio unit syariah di tahun ini menjadi 7 persen.

"Portofolio kita tahun lalu Rp2,5 triliun, syariah sendiri mengambil porsi sekitar Rp100 miliar kurang lebih 4%. Tahun ini dari Rp3,2 triliun (portofolio) direncanakan menjadi 7% untuk syariah," tuturnya.

Sebelumnya PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life Indonesia) menyatakan persiapan spin off UUS semakin matang. Bahkan perseroan menargetkan ini bakal dilakukan pada awal semester II-2023.

"Persiapan sudah (90%) lebih, jadi nanti setelah dapat lisensi OJK kemudian kita fully operatедnya mungkin 1-2 bulan setelah itu," kata Managing Director Sharia Allianz Life Indonesia Achmad Kusna Permans.

Achmad menyebutkan bahwa pada kuartal I-2023 pihaknya memiliki ekuitas di angka Rp5,7 triliun untuk bisnis konvensional dan Rp3,2 triliun untuk unit usaha syariah. **(kta)**



ALLIANZ LIFE - Suasana di kantor Allianz Life Indonesia di Jakarta, tahun 2020 dan kuartal I 2021, di Jakarta, (3/6/2021).

Judul	Bhineka Life Buka Kantor Pemasaran di Medan
Nama Media	Ekonomi Neraca
Newstrend	Bhinneka Life Memperluas Penetrasi Pasar
Halaman/URL	Pg5
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	positive

Bhinneka Life Buka Kantor Pemasaran di Medan

NERACA

Jakarta - Perusahaan asuransi jiwa PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) meresmikan kantor pemasaran barunya di kota Medan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Komplek Tomang Blok D No. 143, Medan, Rabu (12/7).

Peresmian dilakukan secara langsung oleh President Director Bhinneka Life, Benny Indra dan Chief Agency Officer Bhinneka Life, Johan R. Waworuntu beserta seluruh jajaran manajemen, staff dan agen pemasar Bhinneka Life Medan. Benny mengatakan pembukaan kantor pemasaran regional Medan merupakan wujud nyata komitmen Bhinneka Life dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada nasabah.

"Lokasi kantor pemasaran cabang Medan sangat strategis yaitu terletak di jalan protokol kota Medan, sehingga lebih mudah untuk dijangkau oleh nasabah yang berdomisili di kota Medan. Dengan begitu diharapkan nasabah menjadi lebih mudah untuk mengakses layanan Bhinneka Life terkait dengan kebutuhan asuransi jiwa," ujar Benny melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/7).

Benny menambahkan, Medan adalah salah satu kota yang memiliki potensi pasar yang tidak kalah baik dibanding Jakarta. "Melihat karakter masyarakat Medan yang pekerja keras dan sangat bisa melihat peluang di mana sumber pendapatan berada, kita percaya kantor pemasaran Medan akan bertumbuh dengan pesat," pungkasnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kota Medan melalui medankota.bps.go.id, bahwa ekonomi kota Medan tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,71 persen (y-on-y). Disamping itu Johan mengatakan, pihaknya terus berfokus untuk memperluas penetrasi pasar Bhinneka Life di berbagai wilayah Indonesia, dan pembukaan kantor pemasaran ini menjadi strategi yang tepat dalam membidik pangsa pasar menjadi lebih luas lagi.

"Perluasan pangsa pasar ini tentunya juga didukung oleh seluruh agen pemasar profesional kami dan produk unggulan Bhinneka Life yang salah satunya adalah produk Bhinneka Assurance Income Protection yang dapat memberikan manfaat perlindungan pendapatan keluarga Indonesia," kata Johan.

"Dengan premi tetap yang sangat terjangkau yaitu mulai dari 400 ribu rupiah, Bhinneka Assurance Income Protection memiliki banyak keistimewaan, diantaranya perlindungan hingga maksimum usia 70 tahun serta pengembalian premi 100% untuk manfaat hidup dan meninggal dunia," tambahnya.

Saat ini Bhinneka Life memiliki lebih dari 15 ribu orang agen pemasar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan pada kuartal 4/2023, Bhinneka Life telah menunaikan kewajiban pembayaran klaim nasabah senilai Rp167 miliar. 

Judul	OJK Pantau Ketat 11 Perusahaan Asuransi
Nama Media	Koran Kaltara
Newstrend	OJK Pantau Usaha Asuransi
Halaman/URL	Pg5
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	neutral

OJK Pantau Ketat 11 Perusahaan Asuransi

Dua Perusaha Sudah Dicabut Izinnya

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 11 perusahaan asuransi dalam pengawasan khusus. Sebanyak dua dari 11 perusahaan tersebut, izin usahanya sudah dicabut.

Kepala Eksekutif Pengawas Per-

asuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya memiliki departemen yang melakukan pengawasan terhadap asuransi secara khusus.

"Yang pengawasan khusus yang ditangani saat ini 11 perusahaan asuransi, di mana 2 sudah dicabut izin usahanya yaitu namanya asuransi Wanaartha Life kemudian Kresna Life," katanya, Kamis (20/7).

Ogi menyebut sejumlah perusahaan yang telah menyampaikan rencana penyehatan keuangan (RPK). Perusahaan tersebut seperti Jiwas-

raya dan Bumiputera.

"itu termasuk dua perusahaan asuransi yang sudah tidak keberatan kita melakukan program penyehatan," katanya.

Dia juga menyebut ada tujuh perusahaan yang rencana penyehatannya belum disetujui. Terkait perusahaan itu, pihaknya akan melakukan pemantauan secara ketat.

"Ada 7 perusahaan asuransi yang penyehatannya belum disetujui, kemudian juga belum dicabut, ini kita terus monitor secara ketat," imbuhnya. **(dtc)**



Judul	JK Terbitkan Aturan Spin Off Asuransi
Nama Media	Haluan Padang
Newstrend	Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS)
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	positive

JK Terbitkan Aturan *Spin Off* Asuransi

JAKARTA, HALUAN—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis peraturan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang pemisahan (*spin off*) Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Balcid ini salah satunya meminta perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit usaha syariah (UUS) untuk melakukan pemisahan (*spin off*) paling lambat 31 Desember 2026.

“Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan belum melakukan Pemisahan Unit Syariah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud, OJK berwenang melakukan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah,” tulis Beleid tersebut dikutip, Kamis (20/7).

Dijelaskan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang melakukan *spin off* dengan mendirikan perusahaan syariah yang baru dan belum memenuhi persyaratan ekuitas (modal) minimum wajib melakukan penambahan modal.

Dikatakannya penambahan ekuitas Unit Syariah yang berasal dari pemegang saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, penambahan ekuitas Unit Syariah yang berasal dari investor baru dan/atau pengalihan seluruh portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Adapun syarat yang perlu dipenuhi perusahaan untuk *spin off* ini di antaranya nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta Unit Syariah telah mencapai paling sedikit 50 persen, dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu, ekuitas minimum unit syariah telah mencapai paling sedikit Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi, dan Rp200 miliar bagi unit usaha syariah perusahaan reasuransi.

Lebih lanjut, perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit syariah wajib menyampaikan perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah kepada regulator untuk mendapat persetujuan paling lambat 31 Desember 2023.

Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance Rahmat Budi Legowo menyatakan bahwa sebenarnya perseroan telah berencana untuk melakukan *spin off* di tahun 2024, sesuai dengan POJK yang berlaku sebelumnya.

“Waktu itu ada perubahan lagi waktunya 10 tahun, itu pun apabila portofolio asuransi syariah itu sendiri sudah melebihi 50 persen dari total portofolio yang dimiliki oleh satu entitas,” ujarnya di Jakarta, Kamis (20/7).

Budi menuturkan bahwa pihaknya siap mengikuti aturan *spin off* UUS yang dicanangkan oleh regulator. Bahkan, kata dia, pihaknya bakal menambah portofolio unit syariah di tahun ini menjadi 7 persen.

“Portofolio kita tahun lalu Rp2,6 triliun, syariah sendiri mengambil porsi sekitar Rp100 miliar kurang lebih 4 persen. Tahun ini dari Rp3,2 triliun (portofolio) direncanakan menjadi 7 persen untuk syariah,” tuturnya.

Selain itu, sebelumnya PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life Indonesia) menyatakan persiapan *spin off* UUS semakin matang. Bahkan perseroan menargetkan ini bakal dilakukan pada awal semester II-2023.

“Persiapan sudah (90 persen) lebih, jadi nanti setelah dapat lisensi OJK kemudian kita fully operatednya mungkin 1-2 bulan setelah itu,” kata Managing Director Sharia Allianz Life Indonesia Achmad Kusna Permana beberapa waktu lalu.

Achmad menyebutkan bahwa pada kuartal I-2023 pihaknya memiliki ekuitas di angka Rp5,7 triliun untuk bisnis konvensional dan Rp3,2 triliun untuk unit usaha syariah. **(h/ktn)**

Judul	OJK Terbitkan Aturan Spin Off Asuransi
Nama Media	Tribun Medan
Newstrend	Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS)
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	2023-07-21
Sentimen	positive

OJK Terbitkan Aturan Spin Off Asuransi

● Unit Syariah Siap Lepas dari Induknya

JAKARTA, TRIBUN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis peraturan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan (spin off) Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Baleid ini salah satunya meminta perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit usaha syariah (UUS) untuk melakukan pemisahan (spin off) paling lambat 31 Desember 2026.

"Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah dan belum melakukan Pemisahan Unit Syariah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud, OJK berwenang melakukan pencabutan izin pembentukan Unit Syariah," tulis Beleid tersebut, Kamis (20/7).

Dijelaskan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan syariah yang baru dan belum memenuhi persyaratan ekuitas (modal) minimum wajib melakukan penambahan modal.

"Penambahan ekuitas Unit Syariah yang berasal dari pemegang saham Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, penambahan ekuitas Unit Syariah yang berasal dari investor baru dan/atau pengalihan seluruh portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha," jelas nya.

Adapun syarat yang perlu dipenuhi perusahaan untuk spin off ini di antaranya nilai dana tabarru' dan dana investasi peserta Unit Syariah



Waktu itu ada perubahan lagi waktunya 10 tahun, itu pun apabila portofolio asuransi syariah itu sendiri sudah melebihi 50% dari total portofolio yang dimiliki oleh satu entitas.

RAHMAT BUDI LEGOWO
Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia

telah mencapai paling sedikit 50%, dari total nilai dana asuransi, dana tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu, ekuitas minimum unit syariah telah mencapai paling sedikit Rp 100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi, dan Rp 200 miliar bagi unit usaha syariah perusahaan reasuransi.

Lebih lanjut, perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit syariah wajib menyampaikan perubahan rencana kerja pemisahan unit syariah kepada regulator untuk mendapat persetujuan paling lambat 31 Desember 2023.

Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance Rahmat Budi Legowo menyatakan bahwa

sebenarnya perseroan telah berencana untuk melakukan spin off di tahun 2024, sesuai dengan POJK yang berlaku sebelumnya.

"Waktu itu ada perubahan lagi waktunya 10 tahun, itu pun apabila portofolio asuransi syariah itu sendiri sudah melebihi 50% dari total portofolio yang dimiliki oleh satu entitas," ujarnya di Jakarta, Kamis (20/7).

Budi menuturkan bahwa pihaknya siap mengikuti aturan spin off UUS yang dicanangkan oleh regulator. Bahkan, kata dia, pihaknya bakal menambah portofolio unit syariah di tahun ini menjadi 7%.

"Portofolio kita tahun lalu Rp 2,6 triliun, syariah sendiri mengambil porsi sekitar Rp 100 miliar kurang lebih 4%. Tahun ini dari Rp 3,2 triliun (portofolio) direncanakan menjadi 7% untuk syariah," tuturnya.

Selain itu, sebelumnya PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life Indonesia) menyatakan persiapan spin off UUS semakin matang. Bahkan perseroan menargetkan ini bakal dilakukan pada awal semester II-2023.

"Persiapan sudah (90%) lebih, jadi nanti setelah dapat lisensi OJK kemudian kita fully operatednya mungkin 1-2 bulan setelah itu," kata Managing Director Sharia Allianz Life Indonesia Achmad Kusna Permana beberapa waktu lalu.

Achmad menyebutkan bahwa pada kuartal I-2023 pihaknya memiliki ekuitas di angka Rp 5,7 triliun untuk bisnis konvensional dan Rp 3,2 triliun untuk unit usaha syariah. ([kontan.co.id](https://www.kontan.co.id))

Judul	AAJI Ungkap Kondisi Industrialisasi Asuransi Jiwa dalam Lima Tahun Terakhir
Nama Media	wartaekonomi.co.id
Newstrend	Kondisi Industrialisasi Asuransi Jiwa
Halaman/URL	https://wartaekonomi.co.id/read507798/aaji-ungkap-kondisi-industrialisasi-asuransi-jiwa-dalam-lima-tahun-terakhir
Tanggal Berita	2023-07-20
Sentimen	positive

AAJI Ungkap Kondisi Industrialisasi Asuransi Jiwa dalam Lima Tahun Terakhir

Kamis, 20 Juli 2023, 14:39 WIB



Warta Ekonomi, Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan kondisi industrialisasi asuransi jiwa di Indonesia selama lima tahun terakhir. Terjadi peningkatan jumlah perusahaan asuransi dari 50 perusahaan menjadi sekitar 60 lebih perusahaan asuransi. Namun di sisi lain, ada penurunan pendapatan dalam industri asuransi jiwa pada tahun sebelumnya.

Judul	Manulife Indonesia 38 Tahun: Hadirkan Program "Semakin Hari Semakin Baik"
Nama Media	waspada.id
Newstrend	Program "Semakin Hari Semakin Baik"
Halaman/URL	https://waspada.id/medan/manulife-indonesia-38-tahun-hadirkan-program-semakin-hari-semakin-baik/
Tanggal Berita	2023-07-20
Sentimen	positive

Manulife Indonesia 38 Tahun: Hadirkan Program “Semakin Hari Semakin Baik”



20 Juli 2023



MEDAN ([Waspada](#)): Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-38 di Indonesia, Manulife Indonesia mengadakan berbagai kegiatan melalui program ‘Semakin Hari Semakin Baik’, seperti pembangunan sarana air bersih untuk lebih dari 25 keluarga di Desa Ridogalih, Bekasi, dan Fun Walk untuk menekankan pentingnya menjaga kesehatan. Fun Walk diikuti oleh ratusan karyawan, nasabah, dan komunitas.

Aman Kapoor, Chief Marketing Officer Manulife Indonesia mengatakan selain menjaga kesehatan, para peserta Fun Walk berkesempatan untuk berdonasi sebesar Rp138.000 yang didedikasikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus melalui Yayasan Manulife Peduli dengan menggandeng Kitaoneus.

Judul	Pertumbuhan Tertanggung Asuransi Jiwa Cetak Rekor, AAJI: Industri Bersemangat Hadapi Tantangan
Nama Media	rctiplus.com
Newstrend	Kondisi Industrialisasi Asuransi Jiwa
Halaman/URL	https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/3837832/pertumbuhan-tertanggung-asuransi-jiwa-cetak-rekor,-aaji:-industri-bersemangat-hadapi-tantangan
Tanggal Berita	2023-07-20
Sentimen	positive

Pertumbuhan Tertanggung Asuransi Jiwa Cetak Rekor, AAJI: Industri Bersemangat Hadapi Tantangan

Ekonomi | BuddyKu | Kamis, 20 Juli 2023 - 17:28



Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat jumlah total tertanggung dalam industri asuransi jiwa mencapai 85,01 juta orang sepanjang tahun 2022. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 22,4 juta orang atau sekitar 35,8% dibandingkan dengan tahun 2021.

Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif AAJI, memberikan penjelasan terperinci bahwa jumlah tertanggung perorangan mengalami pertumbuhan sebesar 48,9% atau sekitar 28,45 juta orang. Jumlah tertanggung kumpulan juga mengalami pertumbuhan sebesar 30% atau sekitar 56,55 juta orang.

Judul	AAJI Dukung Rencana OJK Klasifikasi Perusahaan Asuransi Berdasarkan Modal Minimal
Nama Media	bisnis.com
Newstrend	Klasifikasi Perusahaan Asuransi Berdasarkan Modal Minimal
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20230720/215/1676731/aaji-dukung-rencana-ojk-klasifikasi-perusahaan-asuransi-berdasarkan-modal-minimal
Tanggal Berita	2023-07-20
Sentimen	positive

AAJI Dukung Rencana OJK Klasifikasi Perusahaan Asuransi Berdasarkan Modal Minimal

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mendukung rencana OJK yang mengklasifikasikan perusahaan asuransi berdasarkan minimal permodalan yang dimiliki.



Anitana Widya Puspa - Bisnis.com

20 Juli 2023 | 21:39 WIB



Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (**AAUI**) mendukung rencana klasifikasi perusahaan asuransi berdasarkan minimal permodalan yang dimiliki seperti yang digulirkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan** (OJK).

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menjelaskan asosiasi telah mencoba mengusulkan kepada OJK agar perusahaan asuransi bisa mencapai **minimal ekuitas** sebesar Rp250 miliar pada 2026 dan bertahap hingga 2030 mencapai ekuitas minimal Rp500 miliar.

Hanya saja, kata dia, OJK bersikukuh ingin tetap mengusulkan ketentuan permodalan hingga Rp1 triliun pada 2028.

"Kami sepakat aja, tapi diatur besaran nominal sama waktunya. Sementara ini masih akan ada diskusi dari OJK untuk win-win solution," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (20/7/2023).